

1.1 Latar Belakang

Mengingat Pedoman Pelayanan Kependetaan Penjaga Hutan (Permenhut) No. P.21/Menhut-II/2009 sehubungan dengan itu menyatakan bahwa nilai moneter Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) di Indonesia diperkirakan mencapai 90% dari nilai finansial lengkap yang dapat dihasilkan dari lingkungan hutan. Selain itu, HHBK juga merupakan salah satu aset teritorial yang paling banyak menyentuh keberadaan jaringan di sekitar hutan. Produk HHBK telah menjadi pembayaran langsung untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi banyak keluarga dan jaringan di seluruh dunia, khususnya individu yang tinggal di daerah terpencil. (Ramang, dkk, 2019) Dalam menciptakan dan memperluas produksi HHBK, pemerintah memberikan pendekatan seperti Pedoman Pelayanan Pendeta Penjaga Hutan Nomor: P.35/Menhut-II/2007 tentang Barang Dusun Bukan Kayu dan P.19/MenhutII /2009 tentang Teknik Perbaikan Barang-Barang Kayu Bukan Kayu Umum. Selain itu, pemerintah juga menetapkan langkah dan pedoman HHBK terbaik sebagaimana tertuang dalam Pedoman Pelayanan Imam Ranger Nomor: P.21/Menhut-II/2009.

Dengan pengaturan ini, pemerintah pusat ingin mengurangi ketergantungan pada produk-produk hutan kayu, meningkatkan pendapatan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan dari HHBK, meningkatkan perhatian masyarakat untuk mengimbangi kawasan hutan dan meningkatkan perdagangan asing dari sektor jasa penjaga hutan non-kayu. serta membuka posisi baru di bidang jasa ranger dimulai dari dagangan HHBK. Melalui pengembangan produk kayu non kayu diharapkan

pemanfaatan HHBK akan lebih maju, baik dari segi jumlah jenis, bentuk, tahapan penanganan dan kualitasnya. Kemudian diharapkan pula potensi kewilayahan akan diefisienkan dalam menciptakan HHBK sebagai sumber pangan pilihan, sumber bahan obat, pembuat serat, pembuat karet yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat dan masyarakat setempat (Sahid, A. , Dan Ratnaningsih, Y. 2021) Nusa Tenggara Barat (NTB) mempunyai potensi yang sangat besar untuk pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK) baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Bima Aturan, potensi HHBK di kawasan hutan adalah madu, asam jawa, rotan, kunyit dan kemiri (Samsudin dan Wanitaningsi, 2019). Pemerintah Daerah Kabupaten Bima telah menetapkan 2 jenis HHBK yang dominan, salah satunya adalah kemiri. Tanaman kemiri telah lama dikenal sebagai tanaman HHBK yang vital dan mempunyai potensi untuk berbagai tujuan dan pendapatan bagi daerah setempat. Berbagai jenis barang dapat dibuat dari bahan-bahan kemiri yang tidak dimurnikan dan benar-benar memberikan komitmen yang tulus terhadap gaji orang. Produk kemiri telah lama menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. (Firani, 2011).

Tabel 1. Perkembangan Luas Lahan, Produksi, dan Produktivitas Kemiri di Kecamatan Parado, kabupaten Bima.

No	Tahun	Luas Lahan (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/ha)
1	2016	203.004	240.580	1,19
2	2017	205.104	210.030	1,02
3	2018	205.104	210.030	1,02
4	2019	94.487	12.457	0.13

5	2020	94.002	12.457	0.13
	Rata-Rata			0.70

Sumber: Data Badan Pusat Statistik, 2020.

Tabel 1 menunjukkan perkembangan lahan, produksi dan efisiensi tanaman kemiri utara 5 tahun. Pada tahun 2016, luas perkebunan kemiri di Kabupaten Bima adalah 203.004 ha, dengan total produksi 240.580 ton, sehingga efisiensi absolutnya sebesar 1,19 ton/ha. Pada tahun 2017-2018, luas perkebunan kemiri mencapai 205.104 ha, sehingga total produksi kemiri sebanyak 210.030 ton atau setara dengan 1,02 ton/ha. T

erlebih lagi pada tahun 2019 dan 2020 total luas perkebunan kemiri mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu mencapai 94.487-94.002 ha sehingga mempengaruhi produksi yang mencapai 12.457 ton atau setara dengan 0,13 ton/ha. Sebelum Pemerintahan Kabupaten Bima menetapkan produk utama sebagai produk kayu non kayu, masyarakat di Kota Parado Rato, Daerah Parado sudah lama memanfaatkan tanaman kemiri sebagai salah satu sumber pendapatan. Sampai saat ini luas perkebunan kemiri di kota tersebut belum diketahui secara pasti, namun sudah banyak masyarakat kota yang memanfaatkan tanaman kemiri tersebut.

Terdapat lima kota yang terbukti memiliki tanaman kemiri, yakni Kota Parado Rato, Kota Parado Hilang, Kota Kuta Parado, Kota Lere Parado, dan Kota Kanca. Seluruh kota yang memiliki perkebunan kemiri berada dalam wilayah Kesatuan Pengurus (KPH) Timberland. Kelompok Masyarakat Timberland di Parado dibentuk pada tahun 1999 dan mendapat izin dari Kesatuan Pengurus Hutan (KPH) pada

tahun 2013. Kemiri yang terletak di kawasan KPH dapat menambah luas kawasan kota. Berdasarkan gambaran di atas, maka sangat penting untuk melakukan eksplorasi terkait hal tersebut **“Analisis Pendapatan Usahatani Kemiri (*Aleurites moluccana*) Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Rumah tangga Petani (Studi Kasus pada Hutan Kemasyarakatan (HKM) di Desa Parado Rato, Kecamatan Parado, Kabupaten Bima)”** dengan harapan setelah melihat nilai tersebut maka usahatani kemiri dapat dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana cara budidaya kemiri (*Aleurites moluccana*) yang paling umum dilakukan di hutan kawasan lokal (HKM) bagi para peternak di Kota Parado Rato, Lokal Parado, Kabupaten Bima?
2. Berapa besar penciptaan, upah dan kemungkinan budidaya kemiri di hutan kawasan lokal (HKM) di Kota Parado Rato, Daerah Parado, Kabupaten Bima?
3. Seberapa besar komitmen iuran budidaya kemiri terhadap gaji keluarga peternak di Kota Parado Rato, Daerah Parado, Kabupaten Bima?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Gambarkan cara budidaya kemiri yang paling umum dilakukan di hutan kawasan lokal (HKM) bagi para peternak di Kota Parado Rato, Kawasan Parado, Kabupaten Bima.
2. Mengkaji kreasi, biaya dan kepraktisan budidaya kemiri di hutan kawasan lokal (HKM) di Kota Parado Rato Wilayah Parado Kabupaten Bima.
3. Kaji komitmen upah budidaya kemiri terhadap gaji keluarga peternak di Kota Parado Rato, Daerah Parado, Kabupaten Bima

1.4 Manfaat Penelitian

hasil penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti.

Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan melakukan penelitian selanjutnya

2. Bagi petani.

Sebagai masukan bagi petani dalam pemanfaatan kemiri pada hutan kemasyarakatan (HKM) untuk meningkatkan pendapatan.

3. Bagi pemerintah.

Sebagai bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk kesejahteraan petani kemiri.

